

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DI
SEKOLAH LUAR BIASA MUZDHALIFAH
KOTA MEDAN**

Disusun Oleh:
SILVESTER ONEKHESI TELAUMBANUA
NPM 208510025



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/2/25

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* OLEH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DI
SEKOLAH LUAR BIASA MUZDHALIFAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

**SILVESTER ONEKHESI TELAUMBANUA
NPM 208510025**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/2/25

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa
Muzdhalifah Kota Medan
NAMA : Silvester Onekhesi Telaumbanua
NPM : 2085100255
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dr. Novita Wirlandari, S.ST., M.Si
Pembimbing

Mengetahui:



Dr. Walid Musthafa S S, Sos, M.IP
Dekan Fakultas Isipol



Dr. Novita Wirlandari, S.ST., M.Si
Kaprodi Ilmu Pemerintahan

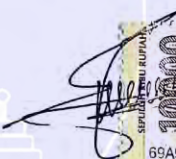
Tanggal Lulus: 24 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dicantumkan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiarisme dalam skripsi ini.

Medan, 24 September 2024


Silvester Onekhesi Telaumbanua
208510025



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvester Onekhesi Telaumbanua
NPM : 208510025
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi kepentingan memajukan ilmu pemerintahan, setuju untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penerapan Prinsip *Good Governance* oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan.

Beserta dengan perangkat yang ada (jika diperlukan), Universitas Medan Area mempunyai hak bebas royalti non-eksklusif untuk menyimpan, mengirimkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), memelihara, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan sebagai hak cipta. Oleh karena itu, saya membuat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal: 24 September 2024
Yang menyatakan,



Silvester Onekhesi Telaumbanua

ABSTRAK

Kemajuan alat teknologi turut andil dalam mewarnai perubahan makna dan pengertian pendidikan. Proses pembelajaran dan pendidikan selalu eksis dan terus berlangsung karena itu, bisa jadi pandangan seseorang tentang makna dan dasar suatu negara, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan beserta hambatan penerapan prinsip *good governance*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jumlah Informan penelitian sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian: (1) Penerapan prinsip-prinsip tersebut belum mampu diimplementasikan secara optimal di SLB Muzdhalifah, (2). Hambatan Penerapan Prinsip *Good Governance* yang Tepat Untuk Pengembangan Proses Belajar Anak Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan. Terutama terkait dengan karakteristik siswa, telah menjadi penghalang dalam menjalankan program pendidikan dengan efektif.

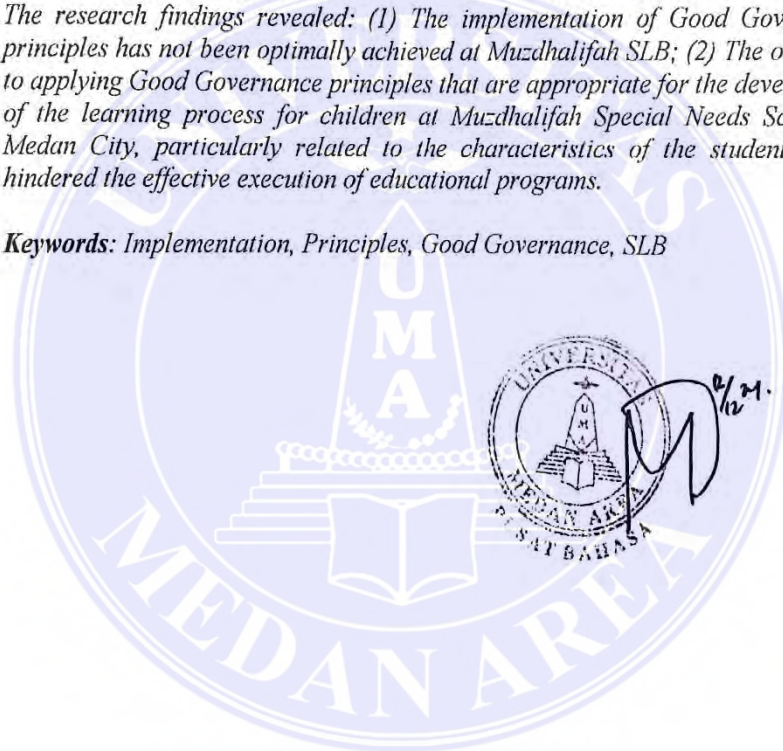
Kata kunci: Penerapan, prinsip, *Good Governance*, dan SLB



ABSTRACT

The advancement of technological tools has contributed to changes in the meaning and understanding of education. The process of learning and education continues to exist and evolve, influencing individuals' perspectives on the meaning and foundation of a nation. This research aimed to identify and describe the implementation of Good Governance principles by the Provincial Government of North Sumatra at Muzdhalifah Special Needs School (SLB) in Medan City, along with the obstacles to implementing these principles. This research employed a qualitative method with a descriptive approach, involving 10 research informants. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The research findings revealed: (1) The implementation of Good Governance principles has not been optimally achieved at Muzdhalifah SLB; (2) The obstacles to applying Good Governance principles that are appropriate for the development of the learning process for children at Muzdhalifah Special Needs School in Medan City, particularly related to the characteristics of the students, have hindered the effective execution of educational programs.

Keywords: Implementation, Principles, Good Governance, SLB



RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Silvester Telaumbanua, lahir di Gunungsitoli pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2000. Penulis merupakan anak ke-empat dari delapan bersaudara dari pasangan Fredrikus Seniosincere Telaumbanua dan Maslina Zebua. Pada tahun 2020, penulis lulus dari SMA Negeri 3 Gunungsitoli. Dan pada tahun 2020 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selain aktif dalam kegiatan perkuliahan, penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Penulis terlibat secara aktif di Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (IKAMITA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan Organisasi Mahasiswa eksternal yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Nias (FORKAMNIS), serta menjadi salah satu mahasiswa yang lolos program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Kemendikbudristek yaitu Program Kampus Mengajar Angkatan 5.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan”**. Selama proses penulisan, penulis juga menyadari betapa banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh sebab itu semua hal yang menjadi kelemahan dan kesenjangan informasi serta pengalaman yang masih sedikit.

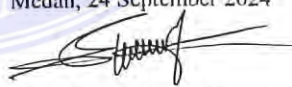
Penulis juga tidak lepas dari dukungan dan bantuan, serta nasihat dari berbagai orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian dengan penuh kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. M.Erwin Siregar, MBA selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim;
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.SC selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring S,Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area beserta Jajaran.
4. Ibu Dr. Novita wulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan juga sebagai Dosen Pembimbing saya selama proses penyusunan proposal ini sampai dengan sidang skripsi, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.

5. Ibu Dra. Waridah Pulungan.M.Hum selaku Dosen Sekretaris yang telah membantu penulis dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang telah memberi ilmu, didikan serta memberi arahan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Staf kepegawaian administrasi dan IT Support Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah membantu pengurusan berkas yang penulis butuhkan.
8. Kepada Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan
9. Kepada teman-teman yang telah berusah payah dalam membantu memberikan dukungan secara pikiran, tenaga maupun materi.
10. Kepada teman-teman satu angkatan Ilmu Pemerintahan 2020, yang selalu bersama-sama dengan saya dalam penyusunan skripsi, terlebih kepada teman saya Ridwan Telaumbanua dan Rynaldi Muhamta.

Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun sehingga adanya upaya perbaikan demi kesempurnaan usulan penelitian ini berikutnya. Penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Medan, 24 September 2024



Silvester Onekhesi Telaumbanua
NPM: 208510025

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pemerintah Daerah.....	8
2.1.1 Definisi Pemerintah Daerah.....	8
2.2 Urusan Pemerintah Daerah	9
2.2.1. Dinas Pendidikan Sumatera Utara.....	11
2.3 <i>Good Governance</i>	14
2.3.1 Konsep <i>Good Governance</i>	14
2.3.2 Prinsip <i>Good Governance</i>	15
2.4 Sekolah Luar Biasa (SLB)	19
2.4.1 Definisi Sekolah Luar Biasa (SLB)	19
2.4.2 Anak Berkebutuhan Khusus	20
2.4.3 Tujuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa.....	21
2.5 Penelitian Terdahulu.....	23
2.6 Kerangka Berpikir.....	26
III METODE PENELITIAN.....	
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Informan Penelitian.....	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.3.1 Observasi	30
3.3.2 Observasi Partisipatif.....	30
3.3.3 Wawancara.....	30
3.3.4 Dokumentasi	31
3.4 Teknik Analisis Data.....	31
3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	33
3.5.1 Lokasi	33

IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1.	Hasil Penelitian	34
4.1.1.	Gambaran umum lokasi Sekolah Luar Biasa atau SLB-C Muzdhalifah Kota Medan.	34
4.1.2.	Sarana.....	37
4.1.3.	Lokasi Penelitian	39
4.1.4.	Struktur Organisasi	39
4.2	Pembahasan.....	42
4.2.1.	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan.....	42
4.2.2.	Hambatan Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> yang Tepat Untuk Pengembangan Proses Belajar Anak Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan.	58
V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan	67
5.2	Saranan.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN.....	73



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Berpikir.....	26
2. Struktur Organisasi Sekolah.....	41



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Sekolah Luar Biasa Di Kota Medan	3
Tabel 2 Kelompok Anak Berkebutuhan Khusus.....	4
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4. Informan Penelitian.....	29
Tabel 5. Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 6. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Ketunaan	36
Tabel 7. Berdasarkan Agama	36
Tabel 8. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia	37



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Observasi	73
2. Pedoman Wawancara	74
3. Surat Riset	75
4. Surat Selesai Riset	76
5. Hasil Observasi	77
6. Hasil Wawancara	77
7. Dokumentasi	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kecerdasan dan pengetahuan manusia dalam memaknai dan memahami pendidikan selalu mengalami perubahan. Modifikasi tersebut didasarkan pada berbagai temuan dan perkembangan di bidang terkait dengan semakin banyaknya komponen sistem pendidikan saat ini. Ide-ide baru bermunculan seiring dengan berkembangnya pola pikir spesialis pendidikan, manajer, dan pengamat.

Kemajuan teknologi juga mempengaruhi makna dan konsep pendidikan. proses pembelajaran dan pendidikan senantiasa hadir dan berkelanjutan. Akibatnya, bisa jadi cara pandang seseorang terhadap makna atau definisi pendidikan yang ditetapkan oleh suatu negara pada berbagai era dan lokasi menjadi tidak penting. Namun, selama belum ada gagasan atau temuan baru mengenai pengertian dan pengertian pendidikan, teori dan hasil sebelumnya masih bisa dijadikan acuan (Munandar, 2022).

Menurut KBBI istilah pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mengandung akhiran 'pe' dan 'an' yang berarti menunjuk pada cara, tata cara, atau kegiatan pengajaran. Mengajar diartikan sebagai suatu cara mempengaruhi etika dan perilaku seseorang atau masyarakat guna mencapai manusia yang mandiri dan dewasa melalui upaya pendidikan, pembelajaran, pendampingan, dan pembinaan (Avionita,2020).

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana

belajar dan belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dengan demikian pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Hingga pada masa ini, pendidikan tidak mempunyai batasan untuk menjelaskan defenisi pendidikan itu sendiri secara lengkap karena sifatnya yang kompleks dengan sasarannya yaitu manusia. Sifatnya yang kompleks itu sering disebut ilmu pendidikan. Sehingga, dalam proses kehidupan manusia keduanya saling berkolaborasi (Munandar,2022:2)

Di Indonesia sendiri masalah pendidikan masih menjadi masalah yang sangat serius bahkan menjadi prioritas atau fokus dalam beberapa tahun terakhir, fokus dalam arti yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan belajar siswa dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia telah memfokuskan program pendidikan belajar wajib 9 tahun untuk siswa di seluruh Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dengan demikian dari penjelasan tersebut berikut data sekolah luar biasa yang berada di kota medan pada tabel 1.1:

Tabel 1
Data Sekolah Luar Biasa Di Kota Medan

No	Kecamatan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Medan Amplas	2	2	2	2
2	Medan Hevetia	2	2	2	2
3	Medan Johor	2	2	2	2
4	Medan Kota	2	2	2	2
5	Medan Labuhan	1	1	1	1
6	Medan Timur	3	3	3	2
7	Medan Sunggal	-	-	-	1
Jumlah		12	12	12	12

(Sumber : kemendikbud,2023)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa ada 7 kecamatan di Kota Medan pada Tahun 2023 yang memiliki jumlah sekolah luar biasa (SLB) sebesar 12 sekolah. Terdapat pada Kecamatan Medan Amplas memiliki 2 sekolah yang terdiri dari SLB Abc Taman Pendidikan Islam dan SLB-C Muzdhalifah. Pada Kecamatan Medan Helvetia memiliki 2 sekolah yang terdiri dari SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi dan SLB Markus Medan. Pada Kecamatan Johor memiliki 2 sekolah yang terdiri dari SLB-A Karya Murni dan SLB-E Al Azhar Medan. Pada Kecamatan Medan Kota memiliki 2 yang terdiri dari SLB-B Karya Murni dan SLB Tunagrahahita Santa Lusia. Pada Kecamatan Labuhan memiliki 1 sekolah yang terdiri dari SLB-C Abdi Kasih. Pada Kecamatan Medan Sunggal memiliki 1 sekolah yang terdiri dari SLB Swasta Mendengar Bicara. Dan pada Kecamatan Medan Timur memiliki 2 sekolah yang terdiri dari SLB-C YPAC Medan dan SLB-D YPAC Medan.

Program pendidikan yang di berikan untuk seluruh siswa atau anak yang ingin belajar ataupun menempuh pendidikan yang layak, yang artinya setiap anak mendapatkan hak yang sama dalam menempuh pendidikan di negara kita ini, baik anak yang sehat secara fisik dan rohani serta mental, maupun anak yang

berkebutuhan khusus nah dalam karya tulis ini secara singkat penulis akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang mempunyai permasalahan fisik, mental, emosional, serta memerlukan pendidikan tertentu (Suparno, 2007:1). Anak berkebutuhan khusus digolongkan menjadi enam jenis disabilitas: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunarungu, dan autisme. Dalam pemenuhan pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus terdapat program khusus yang dijalankan atau diberikan oleh pemerintah yaitu mendirikan Sekolah Luar Biasa untuk anak yang memiliki keterbelakangan mental daripada anak pada umumnya. Sekolah Luar Biasa ini ada yang di kelola oleh pemerintah langsung dan ada yang di kelola oleh pihak swasta yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu:

Tabel 2 Kelompok Anak Berkebutuhan Khusus

NO.	Golongan	Jenis Kebutuhan Khusus
1.	A	Tunanetra
2.	B	Tunarungu a. 27 dB – 40 dB : Sangat Ringan b. 41 dB – 55 dB : Ringan c. 56 dB – 70 dB : Sedang d. 71 dB – 90 dB : Berat e. 91 dB – Keatas: Tuli
3.	C	Tunagrahita (a.1 <i>Down Syndrome</i>) a. C : Ringan (IQ = 50-70) b. C1 : Sedang (IQ = 25-50) c. C2 : Berat (IQ < 25)
4.	D	Tunadaksa a. D : Ringan b. D1 : Sedang
5.	E	Tunalaras (Dyruptive)
6.	F	Tunawicara
7.	G	Tunaganda
8.	H	HIV & AIDS
9.	I	<i>Gifted</i> : Potensi Kecerdasan Istimewa (IQ> 125)
10.	J	Berbakat dalam berbagai kecerdasan, bahasa, logika dan matematika, persepsi visual dan spasial, tubuh dan

		kinestesi, musik, hubungan interpersonal, dan spiritualitas alami
11.	K	Kesulitan tidak Belajar efektif yaitu Hiperaktif, ADD/ADHD, Disleksia/Baca, Disgrafia/Tulis, Diskalkulia/Hitung, Disfasis/bicara, Dispraxia/Motorik)
12.	L	Lambat Belajar ($IQ = 70-90$)
13.	M	<i>Autis</i>
14.	N	Korban Penyalahgunaan Narkoba
15.	O	<i>Indigo</i>

(sumber: diolah penulis 2023)

Dalam pengelolaan Sekolah Luar Biasa sendiri pemerintah berperan penting dan tak bisa lepas baik itu yang di kelola oleh pemerintah (negeri) ataupun swasta. Pemerintah atau Negara memiliki tanggung jawab secara penuh dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa pada saat sekarang ini begitu banyak akses kepada anak yang ingin menempuh pendidikan secara formal maupun secara khusus. Di setiap wilayah Indonesia sudah menerapkan hal yang sama yaitu pemerataan pendidikan hingga ke pelosok negeri.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar dalam pasal 2 berbunyi wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Pada pasal 9, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya untuk kalangan tertentu ataupun hanya untuk siswa yang dibatasi untuk siswa yang secara fisik ataupun psikis.

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka pemerintah Sumatera Utara memiliki tanggung jawab yaitu dari menjamin pemenuhan kebutuhan sumber daya masyarakat, seperti mendirikan sekolah khusus yang diperuntukkan untuk

anak berkebutuhan khusus menggunakan sistem pendidikan inklusif di Sekolah Luar Biasa. Khususnya kota Medan sendiri telah bekerjasama dengan pemprov dengan mendirikan serta memfasilitasi sekolah yang memang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

Dengan demikian pendidikan Sekolah Luar Biasa dibentuk dengan tujuan untuk pembelajaran yang fungsional dan bermanfaat, yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa ABK. Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Minimnya pembinaan terhadap siswa (Anak Berkebutuhan Khusus)
2. Minimnya pembelajaran tanpa menggunakan akses internet
3. Fasilitas belajar kurang lengkap (laboratorium tidak ada)
4. Sistem pengajaran yang kurang optimal karena sedikitnya tenaga pengajar di sekolah luar biasa muzdhalifah kota medan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Governance* Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan?
- b. Apa hambatan yang terdapat dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengembangan Proses Belajar Anak Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan program pemerintah Sumatera Utara terhadap Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan tepat pada sasaran
- b. Untuk mendeskripsikan hambatan penerapan prinsip *good governance* di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis: Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian memberikan tambahan wawasan bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* di sekolah anak berkebutuhan khusus.
- b. Manfaat Praktis: Diharapkan sebagai referensi tambahan dan bahan masukan kepada guru-guru di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan. Dan penelitian ini dimaksudkan juga sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus dapat mendorong peneliti mengembangkan kajian terkait penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

2.1.1 Definisi Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah Pada dasarnya, gagasan tentang pemerintah adalah suatu badan atau organisasi yang telah diberi izin oleh masyarakat untuk menjalankan kewenangannya (Arnold,2023:1).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah yang dimaksud dengan pemerintahan daerah, menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menguraikan tentang unsur Pemerintahan Daerah yang meliputi Kepala Daerah dan unsur Perangkat Daerah. Kepala daerah di provinsi disebut “Gubernur”, sedangkan kepala daerah di kabupaten disebut “Bupati”, dan kepala daerah di kota disebut “Walikota”.

a. Provinsi

Wilayah administratif yang berada di bawah yurisdiksi suatu bangsa atau negara disebut provinsi, yang merupakan kesatuan geografis. Pembagian administratif Indonesia terdiri dari provinsi-provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur.

b. Kota

Menurut Haughton, G., dan C. Hunter (1994), kota adalah tempat di mana orang-orang tinggal dan bekerja sama untuk terus-menerus memperbaiki lingkungan binaan, lingkungan sosial, dan lingkungan alam di suatu wilayah dari skala kecil hingga skala regional sambil secara konsisten memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan global.

c. Kabupaten

suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang bupati. Di Indonesia, kabupaten adalah wilayah administratif tingkat II yang dipimpin oleh seorang walikota, bukan kota. Bupati dan walikota seringkali mempunyai tingkat kekuasaan yang sama. Jumlah penduduk dan wilayah geografis suatu kabupaten dan kota pada umumnya mencerminkan karakteristik yang membedakannya. Kabupaten banyak dijumpai di wilayah pedesaan yang kepadatan penduduknya terbatas dan wilayahnya relatif luas. Kabupaten adalah daerah yang mandiri, seperti halnya kota dan provinsi. Keberadaan kota-kota kecil (bahasa Inggris: towns) berupa kota-kota kecamatan di setiap kecamatan dalam setiap wilayah kabupaten inilah yang membedakan suatu kabupaten dengan kota; sebaliknya, kota tidak memiliki kota kecamatan yang serupa dengan kabupaten.

2.2 Urusan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat peraturan yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Sesuai dengan konsep otonomi dan kewajiban bantuan, undang-undang ini memberikan kewenangan

kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan wilayah hukumnya. Pembagian tanggung jawab pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas masing-masing juga diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, Undang-undang ini mengatur hubungan kerja sama antara pemerintah federal dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab kewenangan bersama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah dan memperkuat struktur pemerintahan daerah. (UU No. 23 tahun 2014).

Pengelolaan pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah di daerahnya masing-masing. Pengelolaan pendidikan di tingkat daerah sebagian besar berada di bawah kendali pemerintah daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. (UU Nomor 23 Tahun 2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan:

1. UU No. 23 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pendidikan di wilayahnya. Hal ini mencakup dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah, penentuan kebijakan sekolah, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan.
2. Kedua, UU ini menekankan pentingnya kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat daerah, termasuk masyarakat berkebutuhan khusus dan daerah terpencil. Pemerintah daerah diharapkan mengambil

langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.

3. UU ini juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah pusat, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Kolaborasi ini dapat berupa penyediaan bantuan, pelatihan tenaga pendidik, serta pengembangan program-program pendidikan yang inovatif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, UU No. 23 Tahun 2014 gambaran pekerjaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan di tingkat lokal, dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan, memastikan kesetaraan akses, dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah.

2.2.1. Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Dalam konteks mengelola dan mengurus sekolah luar biasa, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memegang peran penting sebagai fasilitator dan pengembang. Mereka bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan khusus untuk mendapatkan akses penuh terhadap pendidikan yang berkualitas. Berikut beberapa peran penting mereka

1. Pengembangan Kebijakan:

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang disetujui yang mengarah pada tujuan tertentu yang ditargetkan pada isu spesifik dan terkait yang mempengaruhi sebagian besar anggota masyarakat. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bertugas menciptakan kebijakan pendidikan inklusif yang memfasilitasi

integrasi siswa berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan sebagai bagian dari pelaksanaan mandatnya.

2. **Pengawasan atau Supervisi:**

Menurut Purwanto (2004:76) supervisi adalah segala bantuan dari pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya didalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemeliharaan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memantau dan memberikan supervisi terhadap sekolah luar biasa untuk memastikan bahwa standar pendidikan yang ditetapkan terpenuhi dan kebutuhan siswa terpenuhi dengan baik.

3. **Pengelolaan Sumber Daya:**

Pengelolaan Sumber Daya adalah cara untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai kesejahteraan. Pada kenyataannya, perusahaan pengelola merupakan bagian integral dari operasi dan usaha yang dilakukan dalam kerangka pembangunan, termasuk berbagai aspek yang biasanya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup proyek pembangunan, pertumbuhan, atau pemberdayaan mungkin mencakup banyak sektor penerapan dengan menggunakan sumber daya terdekat dan aset alam di lingkungan sekitar masyarakat. Pemerintah mencetuskan

gagasan pembangunan berkelanjutan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas alokasi dan pengelolaan sumber daya, termasuk dana, fasilitas, dan personel yang diperlukan untuk mendukung pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus.

4. **Pelatihan dan Pengembangan**

Menurut Yoder dalam (Anwar Prabu Mangkunegara, 2009:43) mengartikan pelatihan sebagai pemberian instruksi kepada anggota staf pengawas dan teknis. Untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kebutuhan unik anak-anak dan teknik pengajaran yang efisien, mereka menawarkan pengembangan dan pelatihan kepada para seluruh tenaga pendidik.

5. **Kemitraan:**

Menurut (Rachmat, 2004:40) “Kemitraan adalah hubungan kerja sama yang bersifat strategis dan sukarela antara berbagai pihak yang dibangun atas dasar gagasan saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan. Perusahaan besar juga membantu pertumbuhan UKM melalui kepemimpinan mereka. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, organisasi masyarakat, dan orang tua siswa untuk memastikan bahwa pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus menjadi tanggung jawab bersama.

Melalui peran-peran ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berusaha untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan memberdayakan untuk seluruh anak, termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus.

2.3 Good Governance

2.3.1 Konsep Good Governance

Good Governance berdasarkan PP no. 101 Tahun 2000 adalah pemerintahan yang menciptakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang dapat disepakati bersama oleh masyarakat, antara lain profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan optimal, demokrasi, efisiensi, efektifitas, dan supremasi hukum. *Governance* menurut Lembaga Administrasi Negara adalah proses dimana negara menggunakan kewenangannya untuk menyediakan barang dan jasa publik.

Lembaga Administrasi Negara menekankan bahwa jika dilihat dari aspek fungsionalnya, maka pemerintahan dapat dinilai berdasarkan apakah pemerintah telah bekerja secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuannya atau sebaliknya. Menurut Lembaga Administrasi Negara, pemerintahan negara yang sehat dan bertanggung jawab akan efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif dan interaktif antara lingkup pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat.

Para ahli berbeda pendapat mengenai perbedaan *governance* dan *good governance*, namun definisi tersebut tetap dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Sebuah metode untuk memantau urusan publik dan menjaga ketertiban umum, termasuk pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kemajuan masyarakat, dikenal sebagai tata kelola. (Mardiasmo,2004:20).

Menurut Rauf (2012:18), penerapan tata kelola yang baik memerlukan peningkatan kolaborasi dan kemitraan di tiga aspek konstituen domain tata kelola yang baik, yaitu elemen pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tata

kelola yang baik atau good governance kini dijadikan acuan dalam mengupayakan perubahan organisasi sesuai dengan tujuan reformasi, menurut Sarundajang(2005:152).

2.3.2 Prinsip *Good Governance*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023:4) Memahami prinsip-prinsip pedoman *good governance* yang baik sangatlah penting. Jika suatu pemerintahan mematuhi setiap aspek standar *good governance* yang baik, maka pemerintahan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pemerintahan yang baik atau buruk. Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) diurai satu persatu sebagaimana tertera dibawah ini :

1. Prinsip Transparansi :

Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Prinsip Akuntabilitas:

Dalam pelayanan publik, konsep akuntabilitas adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jelas, tepat waktu, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang sesuai. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 77 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi landasan bagi keharusan instansi pemerintah untuk membentuk sistem akuntabilitas kinerja di Indonesia. Pedoman penanganan piutang negara PUPN/DJKN adapun hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan DJKN dan setiap pekerja di bagian piutang negara.
- b. Harus mampu memastikan sumber daya piutang negara digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran bidang piutang negara.
- d. Perlu difokuskan untuk mencapai visi dan tujuan DJKN, khususnya yang berkaitan dengan Piutang Negara serta hasil dan keuntungan yang diwujudkan.
- e. Harus ikhlas, tidak memihak, dan kreatif guna memacu perubahan pengelolaan piutang negara, misalnya dengan memodernisasi prosedur evaluasi kinerja dan membuat laporan pertanggungjawaban.

3. Prinsip Responsibilitas:

Prinsip tanggung jawab menyatakan bahwa setiap entitas publik dan prosedurnya harus terfokus untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), menurut LAN RI (2003:27). Dalam pengelolaan piutang negara, PUPN/DJKN harus berpegang pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan pemangku kepentingan sejalan dengan prinsip Kementerian Keuangan.

4. Prinsip Independen:

Ketika lembaga-lembaga pemerintah dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan atau pengaruh atau tekanan dari luar, maka lembaga-lembaga tersebut dianggap independen atau mandiri. Hal ini sejalan dengan peraturan

perundang-undangan terkait serta landasan tata kelola yang sehat. Dalam proses pengambilan keputusan, independensi sangatlah penting. Objektivitas dalam pengambilan keputusan akan hilang jika pengambil keputusan kehilangan independensinya.

5. Prinsip Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran):

Hak-hak pemangku kepentingan yang timbul dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dipenuhi secara adil dan merata berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Adapun prinsip-prinsip *good governace* yang di ajukan dalam Program Pembangunan Dunia PBB atau *United Nations Development Programme* (UNDP) (Adianto,dkk 2017:) berikut 9 prinsip *good governance* sebagai berikut:

1. Participation (Partisipasi)

Setiap warga negara memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi semacam ini dibangun atas dasar kebebasan berserikat, berbicara, dan berpartisipasi secara konstruktif .

2. Rule of Law (Aturan hukum)

Aturan hukum harus dilaksanakan secara adil dan tanpa pandang bulu, khususnya hukum untuk Hak Asasi Manusia (HAM). Pada PP No 38 dijelaskan bahwa kewenangan pengelolaan SLB ada pada Pemerintah Kota/Kabupaten, sedangkan pada PP No 17 dijelaskan kewenangan SLB ada pada Pemerintah Provinsi.

3. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan informasi. Setiap proses, lembaga dan informasi secara langsung bisa diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi mesti dapat dipahami dan dimonitor .

4. *Responsiveness* (Daya tanggap)

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus tanggap dalam melayani setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) .

5. *Consensus Orientation* (Orientasi Konsensus)

Good governance dapat menjadi perantara beragam kepentingan yang berbeda dalam rangka memperoleh pilihan terbaik demi kepentingan yang lebih luas, baik menyangkut kebijakan maupun prosedur .

6. *Equity* (Ekuitas)

Semua warga negara mempunyai kesempatan meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka .

7. *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan efisiensi)

Setiap tahapan proses serta lembaga-lembaga mesti menghasilkan sesuai dengan target, dan memanfaatkan sumber yang tersedia sebaik mungkin .

8. *Accountability* (Akuntabilitas)

Para pengambil kebijakan dalam pemerintahan, termasuk sektor swasta ataupun masyarakat sipil (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan para lembaga pemangku kepentingan (*stakeholders*) .

Akuntabilitas sangat bergantung pada organisasi dan sifat keputusan

yang dikeluarkan, apakah keputusan itu demi kepentingan internal atau eksternal organisasi .

9. *Strategic Vision* (Visi Strategis)

Para pemimpin dan publik mesti memiliki perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang jauh ke depan, sejalan dengan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan.

2.4 Sekolah Luar Biasa (SLB)

2.4.1 Definisi Sekolah Luar Biasa (SLB)

Secara umum pengertian Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang mampu mewadahi dan menyelenggarakan pendidikan secara khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus pula. Satuan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus terdiri dari jenjang Taman Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas (SMALB) (Himba, 2020:17).

Menurut Suparno (2007:22), Sekolah Luar Biasa adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sedangkan menurut Mangunsong (2009:28) Sekolah Luar Biasa adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang secara khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau kelainan perilaku.

Undang-undang RI No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian Sekolah Luar Biasa adalah lembaga pendidikan yang

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak tuna atau cacat. Negara kita telah memiliki Sekolah Luar Biasa untuk anak tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, tunaganda dan anak terbelakangan.

2.4.2 Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah individu- individu yang memiliki karakteristik berbeda dari individu lain yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya Bachri (2010).

Berdasarkan pernyataan di atas adakala pentingnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus diberikan fasilitas belajar seperti ruang bina komunikasi dan persepsi bunyi dan irama, ruang bina persepsi bunyi dan bicara, ruang keterampilan dan lain lain.

Ruangan-ruangan tersebut hampir mirip dengan ruangan kelas pada sekolah-sekolah pada umumnya tetapi didukung dengan alat-alat yang dapat membantu para Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk menangkap pelajaran yang diberikan. Berbeda dengan di negara lain Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia terutama di Jakarta tidak memiliki fasilitas yang cukup dan desain ruangan yang baik untuk mendukung dan meningkatkan keinginan belajar para Anak Berkebutuhan Khusus. Vern Jones (Kencana,2012:3).

Menurut data dari tim Nasional Percepatan Panggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2011, jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia adalah sekitar 18.000 anak dengan jumlah seperti ini Sekolah Luar Biasa (SLB) harus memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat membantu mereka dalam belajar agar dapat mengembangkan kemampuan mereka. Selain itu kurangnya dukungan dari masyarakat tentang pentingnya sebuah pendidikan yang layak tidak hanya untuk

anak normal saja menjadi sebuah pertimbangan besar mengenai keberadaan sekolah di Indonesia dan banyak pula masyarakat yang menyepelkan anak-anak berkebutuhan khusus ini dan kadang di pandang sebelah mata oleh masyarakat.

Dari kondisi tersebut, penulis ingin mengajak masyarakat lebih mengenal apa saja yang dihadapi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam pendidikannya dan ingin mengajak masyarakat juga lebih melihat bahwa di dunia ini banyak Anak Berkebutuhan Khusus yang membutuhkan fasilitas yang sama layaknya seperti anak normal lainnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

2.4.3 Tujuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa

Tujuan dari pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang diberikan kepada warga negara yang memiliki kelainan fisik atau mental agar nantinya bisa kembali bersosialisasi ke masyarakat. Kebutuhan akan pendidikan adalah milik semua orang, tidak terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Keterbatasan yang dialami menjadikan Anak Berkebutuhan Khusus memerlukan layanan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Layanan pendidikan yang memfasilitasi pembelajaran dengan menggabungkan siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi mulai diperkenalkan di Indonesia setelah Indonesia ikut menandatangani perjanjian Salamanca yang dilaksanakan di Spanyol pada tanggal 7-10 Juni 1994 yang berisi tentang prinsip, kebijakan dan praktik dalam pendidikan kebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi mulai mendapat perhatian setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 77/P Tahun 2007 Pasal 1 mengenai inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan untuk semua. Sejalan dengan

Keputusan presiden tersebut, sekarang ini sudah banyak terbentuk sekolah-sekolah inklusi yaitu sekolah yang dapat menerima siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa-siswa normal lainnya.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang paling besar memiliki kesempatan untuk menempuh jalur pendidikan inklusi karena memiliki kemampuan akademik setara dengan anak normal pada umumnya. Eli M Bower (dalam Delphie, 2006:78), menyatakan bahwa “anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku adalah anak tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensori atau kesehatan”.

Anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku tidak mampu melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru-guru, bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya, secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi dan bertendensi ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolah.

Akhmad Sudrajat (2008:47), mengungkapkan “penerapan inklusi di Sekolah Dasar didasari dari kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menggunakan program eklektik yaitu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik”. Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang inklusi dibutuhkan guru yang memiliki kebebasan untuk membuat atau mengembangkan ide-ide kreatif, berani tampil beda, mengembangkan potensi diri, dan mandiri.

Dalam Pendidikan inklusi guru dituntut agar dapat mengembangkan seluruh kemampuannya untuk melakukan perubahan memanfaatkan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan disajikan kepada anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki berdasar pada karakteristik masing-masing peserta didik (Foreman & Mitchell, 2005 dalam Nur Azizah, 2008:2).

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama /Judul/ Tahun/ Sumber	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
1	Rani Reka: Manurung Peran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara Dalam Upaya Pengembangan Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Autis (skripsi/2020)	Kualitatif	Peran dinas pendidikan melakukan pengkoordinasian, mengawasi dan mengupayakan pengelolaan manajemen layanan agar lebih baik selain itu juga, bidang pembinaan pendidikan khusus sangat berperan dalam fasilitas pengembangan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana pengembangan kurikulum dan pembinaan kesiswaan pendidikan khusus/autis	Perbedaan: Menggunkan indikator yang berbeda dan dalam pelaksanaan program hampir mirip namun slb muzdhalifah bergerak bersama dengan pemerintah dan orangtua dalam keberhasilan program. Persamaan : penelitian sama-sama bergerak dibidang pendidikan dan dengan fokus penelitian untuk mengetahui hubungan pemerintah serta tanggung jawab pemerintah dalam setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan.

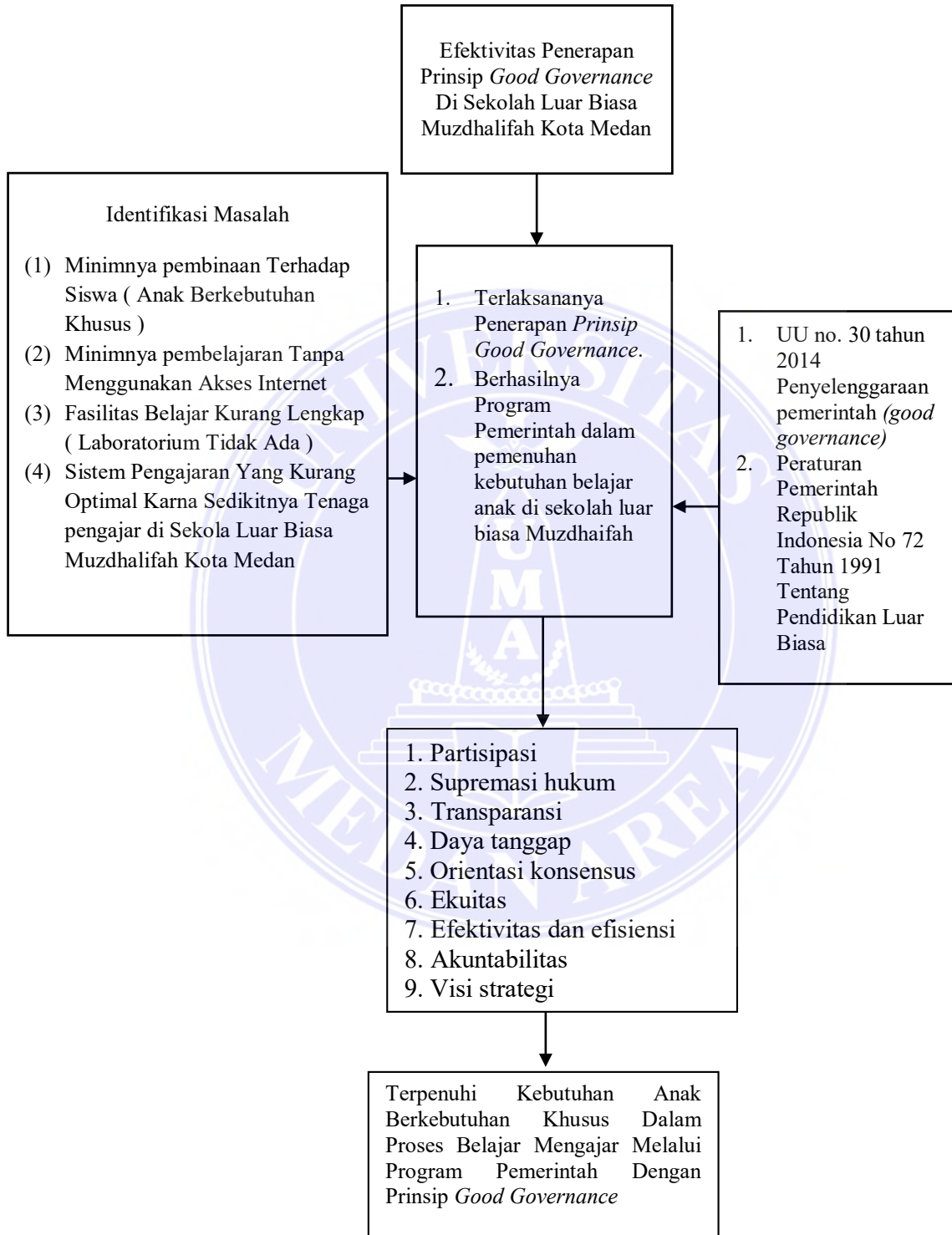
2	<p>Oktavia Mulianingtyas: Peran Sekolah Luar Biasa SLB Pertiwi Dalam Meningkatkan Kecerdasan Anak Didik Untuk Anak Tunagrahita (skripsi/2022)</p>	<p>Penelitian Ini Merupakan Penelitian Deskriptif Kualitatif.</p>	<p>Di dalam penelitian diketahui terdapat interaksi dan sosialisasi antara pengajar, murid, dan orang tua. Pengajar dan orang tua berinteraksi dengan tujuan agar anak tunagrahita mengembangkan kemampuan akademik dan sosial secara bersama-sama. Pengajar dan murid saling berinteraksi agar anak tunagrahita dapat meniru dan memahami tindakan mana yang baik untuk dilakukan.</p>	<p>Perbedaan: terletak pada fokus penelitian dimana pada skripsi ini lebih berfokus pada peserta didik serta kemampuan berkembang pesertadidik. Persamaan: kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sekolah luar biasa dan juga pendidikan luarbiasa bagi anak disabilitas.</p>
3	<p>Sarfia Sarifuddin: Penggunaan Media Keranjang Hamtaro Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Peserta Didik Tunarungu Kelas Dasar Iii Di SLB-B Ypplb Makassar (skripsi/2021)</p>	<p>Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.</p>	<p>Di SLB B YPPLB Makassar penggunaan media keranjang Hamtaro dalam pembelajaran matematika memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa tuna rungu kelas III SD. Keranjang Hamtaro mengandung kualitas yang sesuai dengan situasi tertentu Yang dibutuhkan oleh siswa</p>	<p>Perbedaan: penelitian ini berfokus pada media pembelajaran peserta didik. Persamaan: sama-sama membahas tentang kualitas pendidikan pada sekolah luar biasa</p>
4	<p>Ardayoga Sandi Satria: Efektivitas Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pada Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta) (skripsi/2019)</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Program SPAB di SLB Negeri 1 Bantul telah berjalan sesuai prosedur dan target, dengan pemenuhan tiga pilar SPAB sebagai indikator keberhasilan. BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa koordinasi dan komitmen berbagai pihak telah memastikan kelancaran program ini.</p>	<p>Perbedaan: penelitian ini berfokus pada penanganan dan kesiapan dalam menangani bencana yang akan dihadapi Persamaan: sama-samamenggunakan penelitian dengan menggunakan model pendekatan deskriptif kualitatif dan sama-sama membahas tentang pentingnya</p>

			SLB Negeri 1 Bantul rutin mengadakan simulasi, dan para siswa dengan berbagai keterbatasan tetap semangat menjalankan kegiatan SPAB.	perhatin khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus
5	Harwanti Novindari1), TianFitriara Huda2): Peran Pemerintah Dalam Pemberian Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Banyuwangi (skripsi/2018)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kualitas sdm yaitu tenaga pendidik nya, pemeliharaan sarana prasarana pendukung pendidikan, melakukan promosi untuk mengenalkan keberadaan SDLB PGRI Bangorejo dan SDLB PGRI 2 Jajag Gambiran. Pihak sekolah juga membangun hubungan dengan lembaga lain untuk menjalin kerja sama baik untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik, perbaikan sarana prasarana, utamanya penyediaan media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.	Perbedaan: peneltian berfokus pada ukuran peningkatan pertumbuhan sdm melalui pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Persamaan: sama-sama membahas tentang peran pemerintah dalam pemeretaan pendidikan yang layak dan bisa dirasakan oleh anak-anak berkebutuhan khusus.

(Sumber : diolah oleh peneliti 2023)

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1 Kerangka Berpikir



(Sumber: Peneliti, 2023)

Berdasarkan pada hasil gambar 2.5 Kerangka berpikir dapat dijelaskan bahwa di Sekolah luar Biasa Kota Medan, terdapat beberapa poin permasalahan di antaranya (1) Minimnya pembinaan terhadap Siswa (Anak Berkebutuhan Khusus); (2) Minimnya pembelajaran tanpa Menggunakan Akses Internet ; (3) Fasilitas Belajar Kurang Lengkap (laboratorium tidak ada); dan (4) Sistem Pengajaran yang Kurang Optimal Karena Sedikitnya Tenaga pengajar di Sekola Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan.

Dalam hal tersebut pada fokus penelitian ini telah dilaksanakannya penerapan prinsip *good governance* dan berhasilnya program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan belajar anak di Sekolah Luar Biasa Muzdhaifah. Dari penjelasan tersebut di dukung regulasi/ kebijakan terkait yang menjadi payung hukum di antaranya UU no. 30 tahun 2014 Penyelenggaraan pemerintah (*good governance*) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa.

Peneliti menggunakan Teori *Good Governance* dari *United Nations Development Programme* (UNDP) dengan 9 prinsip *good governance* yaitu; (1).Partisipasi, (2).Supremasi Hukum, (3).Transparansi, (4).Daya Tanggap (5).Orientasi Konsensus atau Penengah, (6). Equitas atau Kesetaraan, (7).Efektivitas, (8).Akuntabilitas, (9).Visi Misi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan teori dari Moleong (2014:4) yaitu jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dokumen pribadi, tetapi bukan dokumen berupa angka dan angket, dimana peneliti menjadi teknik kunci utama dalam pengumpulan informasi maupun data.

Penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara rinci mengenai peristiwa secara transparan sebagaimana adanya sehingga mendapatkan kebenaran dari objek yang akan diteliti permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa secara transparan sebagaimana adanya sehingga mendapatkan kebenaran dari objek yang akan diteliti.

3.2 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2014:4) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan penelitian merupakan sumber informasi yang memuat data yang diperlukan dalam menguraikan dan menafsir fenomena-fenomena objek yang diteliti. Dan juga informan penelitian diambil berdasarkan teknik pengambilan sample, sampling yang digunakan dalam pendekatan kualitatif (Bungin, 2011:106)

- a. Informan kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi maupun fenomena pada masyarakat secara garis besar, tetapi juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti.
- b. Informan utama, merupakan informan yang senantiasa merujuk pada peran seseorang dalam memberikan penjelasan terkait masalah yang diangkat dalam penelitian, tetapi tidak berfungsi dalam verifikasi data.
- c. Informan pendukung, merupakan informan yang biasanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan (Heryana, 2018).

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Deskripsi	Jumlah Orang	Jenis
1.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara	1	Informan Kunci
2.	Kabid Dinas Pendidikan Provinsi Sumut	1	Informan Utama
3.	Kepala Sekolah	1	Informan Utama
4.	Guru	2	Informan Pendukung
5.	Wali Murid	5	Informan Pendukung
Total		10 Orang	

(sumber: diolah penulis 2023)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data sehingga peneliti mampu mendapatkan data secara standar sesuai dengan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif peneliti ingin pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber primer, dan teknik

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif.(Sugiyono,2016:224)

3.3.1 Observasi

Menurut Moleong (2014:127), peneliti memperoleh data dengan cara pengamatan langsung atau melihat dari dekat objek penelitian, observasi dilakukan terhadap keseharian responden yaitu Kepala Sekolah yang berkaitan dengan penerapan prinsip *good governace* yaitu dengan dorongan positif, disiplin positif dan bantuan guru-guru. Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial.

3.3.2 Observasi Partisipatif

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

3.3.3 Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih. Wawancara ini bisa juga mendengarkan langsung keterangan dari informan. Wawancara mendalam adalah cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak dinas yang terkait ataupun sekolah yang akan diteliti (Emzir,2014:3).

3.3.4 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari topik penelitian yang dijelaskan dalam wawancara, yang membantu dalam penyusunan hasil akhir penelitian. Dalam dokumentasi ini, barang bukti disajikan dalam bentuk gambar, rekaman, tulisan atau video. Ini adalah deskripsi hasil penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti bersama-sama dengan element atau informan. (Sukmadinata 2009:221).

3.4 Teknik Analisis Data

Sugiono (2018:482) mengartikan analisis data sebagai suatu prosedur pencarian yang juga melibatkan pengumpulan informasi secara teratur dari observasi dan wawancara dengan cara mengklasifikasikan data dan memilih mana yang akan dimasukkan. Badan yang akan diperiksa dan kesimpulan yang diambil darinya sangatlah penting mudah dipahami baik untuk penulis maupun orang lain.

Dalam hal ini, para peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, khususnya yang berkaitan dengan representasi informasi penting yang masuk akal sebagaimana adanya. Hal ini dilakukan karena tujuan penelitian yaitu untuk mengumpulkan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara sebelum melakukan kategorisasi data, interpretasi, dan analisis informasi rinci diberikan dalam format cerita.

a. Reduksi data

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2016:247-249)

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data, menyarankan agar data ditampilkan baik dalam bentuk uraian (naratif), *tabel*, *chart*, *network* dan format gambar lainnya. Hal ini berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam membaca dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian (naratif) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti. (Sugiyono: 2016:247).

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2016) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.5.1 Lokasi

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang akurat. Dalam hal ini penulis berusaha menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti pada Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.5.2 Jadwal Penelitian

Tabel 5. Jadwal Penelitian

No	Urutan kegiatan	2023				2024								
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Pengajuan Judul	■												
2	Penyusunan Proposal		■											
3	Seminar Proposal			■										
4	Perbaikan Proposal				■									
5	Penelitian					■								
6	Penyusunan Skripsi						■							
7	Seminar Hasil							■						
8	Perbaikan Skripsi								■					
9	Sidang Meja Hijau									■				
10	Revisi Final Skripsi										■			
11	Penyerahan Skripsi KeKaprodi											■		

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Penerapan Prinsip *Good Governance* Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan belum optimal. sistem belajar mengajar menggunakan asesmen berbasis teknologi namun program tersebut belum dapat diikuti oleh siswa dengan baik karena peserta didik tersebut memiliki keterbelakangan mental yang berbeda-beda. Sebagai sekolah penggerak Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan telah melaksanakan beberapa program lainnya yang mendukung pengembangan proses belajar mengajar yang inklusif, yaitu dengan mengadakan kegiatan belajar di luar ruangan seperti kunjungan ke kantor dinas dan tempat-tempat bersejarah. Seluruh program ini dilaksanakan dengan prinsip *good governance* sebagaimana mestinya. Dalam konteks penerapan prinsip *good governance*, penelitian ini memunculkan bahwa meskipun SLB Muzdhalifah telah melakukan upaya yang signifikan, namun masih terdapat kendala-kendala yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Salah satu faktor penghambat utamanya adalah karakteristik siswa di SLB Muzdhalifah dan penggunaan teknologi.
2. Hambatan yang terdapat dalam penerapan Prinsip *Good Governance* pada pengembangan proses belajar anak di sekolah luar biasa Muzdhalifah Kota Medan yaitu terdapat pada indikator efektivitas, yaitu dalam penggunaan teknologi. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan dalam menjalankan

kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dengan keterbatasan khusus, serta belum adanya kesiapan pemerintah dalam membentuk direktorat pendidikan inklusi, semuanya berkontribusi terhadap kurangnya efektivitas penerapan prinsip *good governance* di SLB Muzdhalifah. Kendala-kendala ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pelaksanaan program-program pendidikan yang berkualitas, serta dapat menghambat perkembangan potensi anak-anak dengan disabilitas. Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan dan perbaikan yang lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan meningkatkan efektivitas penerapan prinsip *good governance* di SLB Muzdhalifah, sehingga semua anak dapat mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas.

5.2 Saranan

Untuk memperbaiki dan membangun ke depan terhadap program pemerintah dengan menerapkan prinsip *good governance* di SLB Muzdhalifah Kota Medan, sejumlah saran dapat diajukan sebagai berikut:

1. SLB Muzhalifah Kota Medan, perlu meningkatkan akses dan pemahaman tenaga pendidik, tenaga pendidikan dan siswa/i akan pentingnya teknologi dalam mendukung proses pembelajaran, antara lain seperti Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi guru dan staf sekolah tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran khusus untuk anak-anak dengan disabilitas dapat membantu mengatasi ketidakmampuan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran berbasis

teknologi. Selain itu, SLB C Muzhalifah Kota Medan perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui Kolaborasi antar lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta perlu diperkuat. Kerjasama yang erat dan sinergis dengan berbagai pihak dapat saling mendukung dan memperkuat upaya untuk meningkatkan penerapan prinsip *good governance* di SLB Muzdhalifah. Dengan langkah-langkah konkret dan kerjasama yang kuat, diharapkan SLB Muzdhalifah dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan inklusifnya dan memberikan layanan yang lebih baik bagi anak-anak disabilitas di Kota Medan.

2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, perlu melakukan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan disabilitas. Kampanye penyuluhan yang terarah dan strategis akan membantu mengatasi stigma dan stereotip negatif yang masih ada di masyarakat, serta memperkuat dukungan bagi anak-anak dengan disabilitas di SLB Muzdhalifah. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perlu menggagas pembentukan direktorat pendidikan inklusi yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di tingkat daerah, sehingga dapat mengatasi tumpang tindih dalam alokasi siswa antara sekolah reguler dan sekolah luar biasa, serta memastikan bahwa semua anak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan institusi pendidikan pada Sekolah Luar Biasa, khususnya SLB Muzdhalifah Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arnold Ferdinand Bura, M. J. (2023). *Pemerintah Daerah Konsep Teori dan Karakteristik*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, Juni 2023.
- Adisasmita. (2010). *Pertumbuhan dan Efektivitas Pembangunan Tata Ruang Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Abdurahmat. (2003). *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar Prabu Mangkunegara. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bachri Syaiful. (2010) *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bambang Sugiono & Ahmad Husni M.D. AGUSTUS (2000) Supremasi Hukum dan Demokrasi NO. 14 VOL. 7 : 71 - 82
- Bungin. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Frieda Mangunsong. (2009). *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kesatu*. Jakarta : LPSP3 UI
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly .(2001). *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, Jakarta: Erlangga
- (2001) *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,), hal 120.
- Haughton, G., & Hunter, C. (1994). *Sustainable Cities*. London: Regional Studies Association.
- Ibrahim, R. (2014). *Psikologi pendidikan jasmani dan olahraga PLB*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: MAP UGM dan Pustaka Pelajar
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Mangunsong, Frieda. (2009). *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*. Jakarta: LPSP3 UI
- Mardiasmo. (2004). Otonomi and Manajemen Keuangan Daerah. In Otonomi and Manajemen Keuangan Daerah.
- Moleong, Lexy (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- . (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya

- Muhammadong, (2017) *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam, Edukasi Mitra Grafika, Cetakan I*
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya;221)
- Purwanto, ngalim. (2004) *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sarundajang. (2005). *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sondang P. Siagian, (2002), *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,
- sugiyono. (2016). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*. bandung: pt alfabet.
- Suparno. (2007), *Metodologi Pembelajaran Fisika*, Yogyakarta. Universitas Sanata Darma
- Suparno. (2007). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas
- Steers. (1985). "Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment". *Administrative Science Quarterly*
- Tarmansyah.(2007), *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*, Jakarta: Depdiknas
- Tjiptono, Fandy dan Chandra, Gregorius. 2011. *Service, Quality & Satisfaction*. Edisi 3. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju.
- Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi*, Ed. 2, cet, Jakarta : Kencana

Artikel Ilmiah (Jurnal/ Skripsi/ Tesis)

- Ab Marisyah, Firman, R. (2019). *Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Tentang Pendidikan*. 3, 1514–1519
- Adianto, dkk. (2017). *Model Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Pekanbaru*. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* Vol. 8, No. 1: 1-24
- Bayu Kharisma, "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik
- Budiani, Ni Wayan. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, Vol.2, No.1, (2007)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 3
- Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Jogjakarta: Redaksi Maxima, 2014), 9-10.

Guinchat V, Thorsen P, Laurent C, Cans C, Bodeau N, Cohen D. (2012). Pre-, Perinatal Neonatal Risk Factor for Autism. *ACTA Obstetrica et Gynecologica* 91: 287-300

Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., Yumriani, Y., & Bp, A. R. (2022). Pengertian Pendidikan Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa*, 2(1), 1-8

Rauf.,(2012). Perananan *Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Membantu Tugas Lurah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. Disertasi Program Doktor Ilmu Pemerintahan. Universitas Satyagama. Jakarta

Vern Jones & Louise Jones, *Manajemen Kelas Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2012),hlm. 3

Website

Avionita, S. (2020). Pentingnya Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal dalam Meningkatkan Prestasi Belajar dan Karakter Siswa. Retrieved Oktober 27, 2023, from sipemas.uin-malang: <https://sipemas.uin-malang.ac.id/blog/pentingnya-pendidikan-formal-nonformal-dan-informal-dalam-meningkatkan-prestasi-belajar-dan-karakter-siswa-1>

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/4\(empat\)PrinsipGoodGovernancedalamPengurusanPiutangNegara](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/4(empat)PrinsipGoodGovernancedalamPengurusanPiutangNegara)

VOL. 2 NO. 3 (2024): JRIE september 12, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Direksi, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, dan Umur Perusahaan Terhadap Manajemen Laba*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEDOMAN OBSERVASI

Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan / program
4. Respon/ Sikap

Instansi : Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan
 Nama Program : Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan
 Lokasi : Medan, Kecamatan Medan Amplas
 Tanggal :

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Indikator
1	Kebijakan pemerintah yang telah di rancangan			
2	Fungsi dan peran pemerintah dalam membantu pengelolaan dan pengembangan sekolah			
3	Kelengkapan fasilitas belajar anak			
4	Respon Sekolah dalam pelaksanaan program pemerintah			
5	Tanggapan guru dan wali murid			
6	Program Kerja			
7	Website Instansi			
8	Sosial Media Instansi			
9	Agenda Kegiatan/Program			

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan

A. Identitas Responden


1. N a m a :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan?
2. Apakah Hambatan yang terdapat dalam penerapan prinsip *good governance* di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan?
3. Kapan pelaksanaan program penerapan prinsip *good governance* mulai diterapkan di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan?
4. Siapa pelaku atau pelaksana serta penanggung jawab dalam penerapan prinsip *good governance* di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan?
5. Dimana kita dapat memberikan laporan jika terjadi masalah atau kendala dalam penerapan prinsip *good governance* di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan?

LAMPIRAN 3

SURAT RISET

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II Jalan Setebudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A. (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 181/FIS.1/01.10/1/2024 Medan, 23 Januari 2024
Lampiran : -
Hal : Perrmohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
D. Yusub Cah. Didiq No. 1 D. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan
Sumatera Utara 20151

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Silvester Onekhesi Telaumbanuz
NIM : 208510025
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditacirwa,
Medan, 23 Jan 2024
Ju


Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.P.

NOHP: 0812 6035 9424
Tembusan:
1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

LAMPIRAN 4

SURAT SELESAI RISET

**SEKOLAH LUAR BIASA "MUZDALIFAH"**
BAGIAN TUNA GRAHITA
SLB / C

Sekretariat : Jalan Garu – VI Gg. Merak No. 15-A Telp. 0617862631 Medan

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor: 284-10/SK/SLB-C/M/IV/2024

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. MHD IQBAL, M. Si**
NIP :
Jabatan : **KEPALA SEKOLAH**
Instansi : **SLB C MUZDALIFAH**

Menerangkan bahwa ,
Nama : **SILVESTER ONEKHESI TELAUMBANUA**
NPM : **208510025**
Judul : **Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan**

Bahwa mahasiswa tersebut benar telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dan pengambilan data dimulai tanggal 22 Maret 2024 s/d 22 April 2024 di SLB C MUZDALIFAH.
Demikian surat keterangan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 22 APRIL 2024
KEPALA SLB C MUZDALIFAH

**Dr. MHD IQBAL, M. Si**

LAMPIRAN 5
Hasil Observasi
Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah
Kota Medan

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan / program
4. Respon/ Sikap

Instansi : Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan
 Nama Program : Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan
 Lokasi : Medan, Kecamatan Medan Amplas
 Tanggal : 25 Januari 2024

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Indikator
1	Kebijakan pemerintah yang telah di rancangan	✓		Sebagian besar program telah dilaksanakan dan beberapa program lainnya juga telah dirancang untuk pengembnagan khususnya potensi guru.
2	Fungsi dan peran pemerintah dalam membantu pengelolaan dan pengembangan sekolah	✓		Telah memberikan bantuan berupa Dana Bos, sesuai dengan yang telah direncanakan sesuai kebutuhan sekolah
3	Kelengkapan fasilitas belajar anak	✓		Ada dan layak pakai
4	Respon Sekolah dalam pelaksanaan program pemerintah	✓		Sangat menerima bantuan dan program Pemerintah
5	Tanggapan guru dan wali murid	✓		Program yang diberikan di minta untuk mampu terus berkembang demi kemajuan kualitas pendidikan.
6	Program Kerja	✓		Dijalankan sesuai dengan prosedur.
7	Website Instansi	✓		www.slbcmuzdalifahkotamedan.com
8	Sosial Media Instansi	✓		Fb: Slb C Muzdalifah Kota Medan
9	Agenda Kegiatan/Program	✓		Peningkatan Mutu Pendidikan Program Sekolah Penggerak Slb Muzdhalifah Kota Medan. Lokasi: Lantamal I Belawan

LAMPIRAN 6

HASIL WAWANCARA

Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan

A. Identitas Responden

1. N a m a : Fridolin
2. Jenis Kelamin : Laki Laki
3. Umur : 35 tahun
4. Pekerjaan : Staf Ahli Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana Keseriusan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terhadap pelaksanaan program pemerintah dengan menerapkan prinsip *good governance*?

Jawab: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menegakkan prinsip *good governance* secara konsisten dalam pelaksanaan segala program pemerintah. Melalui penerapan prinsip ini, setiap kegiatan dan program yang sedang berjalan atau telah terlaksana menjadi transparan informasi yang sebelumnya sulit diakses terkait dengan anggaran dana dan program pemerintah kini dapat dijangkau melalui berbagai situs internet, termasuk platform seperti Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUD). Dengan aplikasi tersebut, kita dapat memantau penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan. Rencana kinerja sekolah juga dapat diakses melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan dan pelaporan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Apakah Prinsip *good governance* ini adalah solusi dari pemerintah atas segala keluhan yang ditemui oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan program pemerintah seperti penggunaan dana (BOS) oleh sekolah?

Jawab: Benar sekali! Penerapan prinsip *Good Governance* tidak hanya membantu dalam menangani keluhan masyarakat, tetapi juga secara proaktif mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Selain itu, dengan membangun budaya birokrasi yang bersih dan transparan,

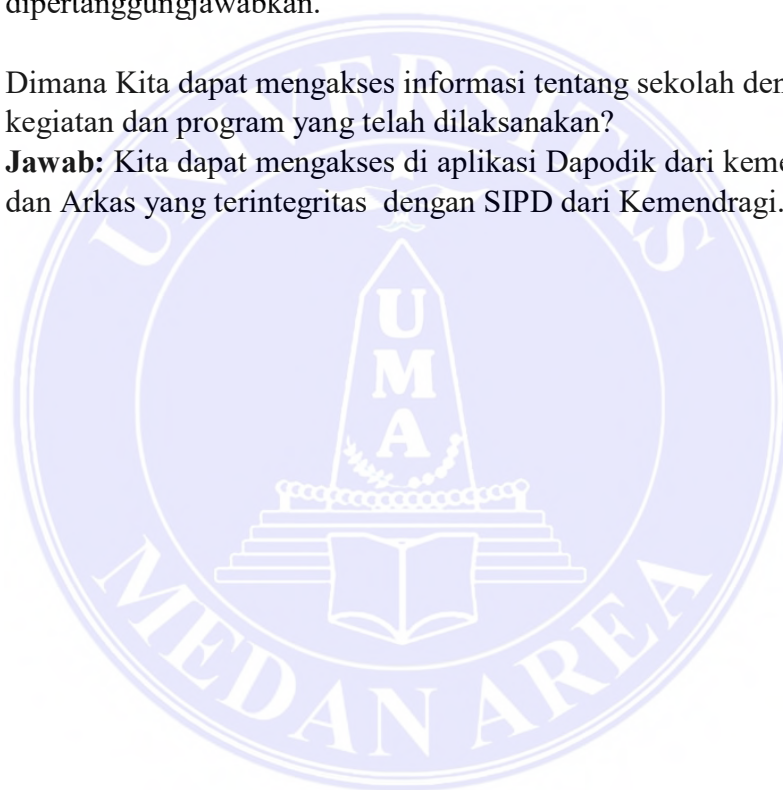
pemerintah dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung kemajuan pendidikan, tetapi juga memperkuat fondasi bagi kemajuan negara secara keseluruhan.

3. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyukseskan tercapainya penerapan prinsip *good governance*?

Jawab: Dalam penerapan *good governance* semua unsur terlibat dalam turwujudnya birokrasi yang bersih. Hubungan kerjasama yang di bangun antara pemerintah, swasta dan masyarakat harus bersifat *akuntabel* dan terbuka demi tercapainya birokrasi yang bersih dan efisien serta bisa dipertanggungjawabkan.

4. Dimana Kita dapat mengakses informasi tentang sekolah dengan semua kegiatan dan program yang telah dilaksanakan?

Jawab: Kita dapat mengakses di aplikasi Dapodik dari kemendikbudristek dan Arkas yang terintegritas dengan SIPD dari Kemendragi.



Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan

A. Identitas Responden

1. N a m a : Dr. Mhd. Iqbal, Msi
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Umur : 45 tahun
4. Pekerjaan : Kepala Sekolah SLB Muzdhalifah Kota Medan

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Menurut Bapak Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap prinsip *good governance* di SLB Muzdhalifah Kota Medan?

Jawab: Sejauh ini saya melihat dan terlibat secara langsung penerepan prisnip *good governance* sudah dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, namun tatkala juga masih ada program yang tidak bisa dijalankan dengan sempruna seperti bentuk kebijakan yang tidak tepat pada sasaran pada anak didik yang tidak bisa mengoperasikan komputer.

2. Program apa yang sedang dijalankan bersama pemerintah saat ini?

Jawab: Sekolah dan pemerintah sedang menjalankan program kerjasama yaitu di rujuk sebagai salah satu sekolah penggerak di tingkat sekolah anak berkebutuhan khusus.

3. Seberapa besar pengaruh pemerintah dalam pembangunan sekolah?

Jawab: Sangat berpengaruh dalam semua aspek mulai dari penyediaan fasilitas sekolah dan pengembangan sekolah.

4. Apakah penggunaan dana BOS telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *good govrnance*?

Jawab: Sudah. Seluruh program telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan

A. Identitas Responden

1. N a m a : Widya Hasanah, S. P.W.K
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 24 Tahun
4. Pekerjaan : Guru SLB Muzdhalifah Kota Medan

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimanakah sistem pengajaran yang diterapkan sekolah bagi para murid?

Jawab: Pengajaran yang kita lakukan di SLB Muzdhalifah adalah sistem kekeluargaan, dengan maksud untuk membangun kedekatan emosional yang lebih dalam dengan antara siswa dan guru.

2. Bentuk kerjasama seperti apa yang dilakukan oleh sekolah dan pemerintah?

Jawab: Sekolah dan pemerintah telah melakukan kerjasama dengan salahsatu programnya yaitu pengelolaan dana BOS yang berfungsi untuk pengembangan sekolah dan peningkatan mutu dan kulaitas anak didik.

3. Bagaimanakah pendapat ibu tentang program pemerintah terhadap sekolah khususnya bagi siswa dalam pengembangan proses belajar?

Jawab: Program yang telah dilaksanakan maupun yang dijalankan menurut saya bisa diikuti dengan baik jika seluruh kebijakan yang dibeantuk dapat langsung dirasakan dan dapat terimplementasikan oleh setiap pribadi anak didik.

4. Apakah pembayarn upah guru tepat waktu?

Jawab: Sejauh ini aman aman saja dan tepat waktu tidak ada kendala sama sekali.

**Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah
Kota Medan**

A. Identitas Responden

1. N a m a : Hartaty,S.Pd
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 40 tahun
4. Pekerjaan : Guru SLB Muzdhalifah Kota Medan

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Apakah dalam seluruh perencanaan program kerja sekolah, guru dilibatkan dan dapat ikut serta dalam memantau program tersebut?

Jawab: Ya, secara keseluruhan guru-guru akan selalu dilibatkan dalam perencanaan penganggaran dana BOS

2. Siapakah yang menyediakan tenaga pendidik di SLB Muzdhalifah apakah pihak pemerintah atau yayasan?

Jawab: Untuk tenaga pendidik masih merupakan tenaga pendidik dari yayasan yang digaji oleh yayasan.

3. Menurut ibu apakah penerepan prinsip *good governance* sudah efektif untuk sekolah?

Jawab: kalau dikatakan efektif belum dapat sepeenuhnya ya karena dalam program tersebut masih ada program yang belum bisa diikuti oleh siswa dengan sepenuhnya seperti pada penggunaan teknologi.

Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan

A. Identitas Responden

1. N a m a : Ibu Karitini
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 54 tahun
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana pendapat ibu tentang kualitas dan pelayanan anak ibu di SLB muzdhalifah?

Jawab: Menurut saya secara pribadi saya sudah layak karena selama anak saya bersekolah di SLB Muzdhalifah anak saya sudah cukup banyak perkembangannya terlebih secara kemandirian yang dulunya harus selalu dijaga dan diarahkan untuk melakukan semua aktivitas sehari-hari, sekarang sudah mulai satu persatu bisa dikerjakan oleh anak saya sendiri seperti halnya makan dan mandi dan belajar menulis.

2. Apa program yang paling disenangi anak ibu di sekolah dan dalam proses belajar mengajar?

Jawab: Program yang paling disenangi anak-anak adalah melakukan kunjungan-kunjungan di kantor pemerintahan maupun di tempat lainnya yang dapat menunjang tumbuh kembang anak, misalnya saja kunjungan ke museum yang ada dikota,

3. Menurut ibu apakah pendidikan yang diberikan oleh sekolah terhadap anak ibu sudah sesuai dan layak?

Jawab: Ya sudah sesuai, karena saya melihat secara langsung yang terjadi adalah guru-guru disini sangat memperhatikan apa kebutuhan anak selama proses pembelajaran dan pengajaran yang diberikan sesuai dengan kemampuan anak.

4. Menurut ibu bagaimanakah keaktifan para guru dalam menangani siswa di SLB Muzdhalifah?

Jawab: Sangat aktif, saya sangat senang dengan pelayanan yang diberikan oleh guru terhadap anak saya, sehingga saya sebagai orangtua merasa aman jika anak saya berada selalu dengan gurunya. Saya sebagai orangtua merasakan bahwa guru-guru di SLB Muzdhalifah menjadikan anak saya bagaikan anak sendiri yang dirawat dengan penuh kasih sayang seorang tenaga pendidik.

Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan

A. Identitas Responden

1. N a m a : Widatni
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 50 tahun
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana pendapat ibu tentang kualitas dan pelayanan anak ibu di SLB muzdhalifah?

Jawab: Menurut saya kualitas dan pelayanan di Slb Muzdhalifah cukup baik, karena para perangkat tenaga pendidik mampu berinteraksi langsung dengan para orang tua/wali, juga lingkungan belajar yang inklusif, serta pelayanan yang mencakup pengajaran yang personal, terapi sesuai kebutuhan, dukungan sosial dan emosional, serta kesempatan untuk pertumbuhan dan pengembangan anak.

2. Apa harapan ibu selama anak ibu menempuh pendidikan di SLB Muzdhalifah?

Jawab: Harapan saya adalah semoga anak saya menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan potensinya, selalu diterima dan didukung oleh teman sekelas dan staf sekolah, serta memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pengembangan mereka.

3. Apakah dengan adanya bantuan pemerintah berupa dana BOS proses kegiatan belajar semakin optimal?

Jawab: Iya, karena dana BOS secara optimal dapat memperkuat proses kegiatan belajar di SLB. Seperti peningkatan sumber daya, pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, serta pembangunan fasilitas.

4. Apakah fasilitas dan sarana belajar anak sudah bisa dikatakan layak?

Jawab: Sudah, karena seluruh fasilitas dan sarana yang tersedia cukup lengkap dan mendukung lancarnya proses belajar anak didik dan pengajar.

Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan

A. Identitas Responden

1. N a m a : Supriani
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 49 tahun
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana pendapat ibu tentang kualitas dan pelayanan anak ibu di SLB muzdhalifah?

Jawab: Menurut saya kualitas di SLB sudah kualitas nya sudah cukup sehingga saya sebagai orangtua anak merasa nyaman mulai dari pelayanan guru sampai dengan penyediaan alat belajar anak hingga penyediaan fasilitas sekolah yang mencukupi.

2. Bagaimana menurut ibu dengan metode pembelajaran di SLB Muzdhalifah?

Jawab: Metode pembelajaran yang diberikan oleh gurunya sangat cocok untuk anak-anak terlebih kita tau bahwasanya anak saya juga memiliki kekurangan, namun yang saya sangat senang adalah guru yang tidak membedakan perhatiannya terhadap anak saya dengan anak-anak yang lain.

3. Perubahan apa yang paling dirasakan oleh ibu maupun anak ibu selama menempuh pendidikan di SLB Muzdhalifah?

Jawab: Saya merasakan anaka saya dapat mengontrol emosinya saat ini dan juga bisa melakukan hal-hal kecil yang dulunya harus dibimbing langsung oleh saya orangtuanya namun sekarang sudah mulai mengerti dan bisa mengerjakan dengan mandiri.

4. Apakah ibu dapat menikmati bantuan pemerintah melalui SLB Muzdhalifah?

Jawab: Sampai saat ini saya sudah cukup menikmati abntuan pemerintah di SLB Muzdhalifah ini karena dengan adanya bantuan seperti dana BOS anak saya bisa mendapat pelajaran seperti layaknya anak sekolah pada umumnya, ya meskipun saya tidak menerima secara langsung dalam pribadi say, namun dengan perhatian dan pengajaran yang diberikan kepada anak saya, saya merasa cukup.

Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan

A. Identitas Responden

1. N a m a : Suherni
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 50 tahun
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana pendapat ibu tentang kualitas dan pelayanan anak ibu di SLB muzdhalifah?

Jawab: Menurut saya, kualitas pelayanan di SLB Muzhalifah cukup baik, karena para tenaga pendidik sudah berpengalaman, berpengetahuan luas, dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap anak didik nya.

2. Menurut ibu seberapa tanggap guru dalam merespon setiap kebutuhan siswa selama proses pembelajaran?

Jawab: Menurut saya cukup tanggap, karena guru mampu memahami kebutuhan individu masing-masing siswa. Dan juga setiap siswa memiliki cara belajar dan berinteraksi yang unik, serta pendekatan yang sensitif dan pengertian untuk dapat mengikuti arahan dengan baik.

3. Apakah dalam proses penyusunan anggaran dana BOS orangtua pernah diikut sertakan?

Jawab: Pernah, karna keterlibatan orang tua dalam proses penyusunan anggaran Dana BOS dapat membantu memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan siswa, serta mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan sekolah.

4. Harapan ibu bagi sekolah dan untuk pemerintah?

Jawab: Harapan saya bagi sekolah dan pemerintah adalah semoga sekolah memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak didik mereka, baik secara pengembangan akademik, sosial, maupun emosional. Serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai.

Penerapan Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan

A. Identitas Responden

1. N a m a : Murahmayani
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 28 tahun
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana pendapat ibu tentang kualitas dan pelayanan anak ibu di SLB muzdhalifah?

Jawab: Menurut saya sudah layak dan sesuai dengan kebutuhan anak saya dimana juga anak saya yang memiliki keterbelakangan mental dapat menerima pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak.

2. Adakah program bantuan pemerintah yang didapatkan anak ibu selama belajar di SLB Muzdhalifah?

Jawab: Untuk saat ini kalau secara langsung belum ada.

3. Berdasarkan pengamatan ibu dan juga sudah ibu rasakan, seperti apakah kebijakan pemerintah yang kurang cocok untuk diterapkan di SLB Muzdhalifah?

Jawab: Untuk saya juga kurang memahaminya namun yang bisa sedikit saya jelaskan yaitu ketika anak-anak disuruh menggunakan internet dan alat komunikasi lainnya, anak saya belum bisa mengikuti dengan baik dan mungkin juga kurang cocok ya menurut saya karena anak saya memiliki keterbelakangan mental, saya tidak mengharapkan lebih dari anak saya, saya hanya ingin anak saya dapat sedikit demi sedikit belajar dan memahami pembicaraan orang dan bisa membangun komunikasi yang baik.

4. Apa harapan ibu untuk pemerintah terhadap anak berkebutuhan khusus?

Jawab: Saya berharap pemerintah dapat memberikan beasiswa untuk anak-anak seperti anak saya meskipun anak saya memiliki kekurangan dari segi fisik dan mental, saya juga berharap dapat melihat anak saya menempuh pendidikan kejenjangan yang lebih tinggi misalnya setelah dari SMA bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas.

LAMPIRAN 7

Wawancara dengan staf ahli dinas pendidikan mewakili Kepala Dinas dan Kepala Bidang



Wawancara dengan Guru SLB Muzdalifah Kota Medan



Wawancara dengan Orangtua



Wawancara dengan Kepala Sekolah



Aktivitas belajar mengajar



Dokumentasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara



Dokumentasi Kunjungan Sekolah di Kantor Basarnas



Dokumentasi Kunjungan Sekolah ke Perpustakaan Kota

